

PERAN RAKYAT DAN RAJA DI THAILAND DALAM MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL THAILAND

Aisyah Rizqi Iqbal¹, Audrey Cessnawati Putri Bengu Schlumbergerina¹, Salsabilla Sicillia Arya
Putri¹, Eko A Meinarno³

Universitas Indonesia, Kampus Baru UI Depok 16424, Indonesia
E-mail: meinarno@ui.ac.id.

ABSTRAK

Thailand adalah negara unik di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah, berbeda dengan negara lain di kawasan ini. Nasionalisme Thailand kuat, dengan orang Thai atau Siam yang berasal dari pegunungan Altai di Asia Tengah sekitar 7.000 tahun lalu. Identitas etnis Thai, yang berarti "orang bebas," menjadi dasar kebanggaan nasional mereka. Dengan kemajuan teknologi dan peradaban, sistem pemerintahan aristokratis Thailand mulai bergeser ke arah demokrasi. Perubahan ini mencerminkan spektrum politik yang lebih dapat diprediksi dalam sistem modern. Namun, tantangan utama adalah menjaga tradisi sambil beradaptasi dengan prinsip-prinsip demokrasi. Tiga elemen suci, Bangsa Thai, Raja, dan Buddha berperan penting dalam politik Thailand. Demokrasi harus memberikan ruang bagi peran rakyat dalam pemerintahan, namun tetap mempertahankan peran signifikan Raja dalam sistem politik. Raja di Thailand tidak hanya simbol nasionalisme tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan politik. Artikel ini akan membahas pengaruh perkembangan demokrasi di Thailand, serta upaya negara ini menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Fokusnya adalah pada peran raja dalam menjaga stabilitas politik dan bagaimana nasionalisme etnis Thai dapat selaras dengan tuntutan demokrasi.

Kata Kunci: Demokrasi, Etnis, Nasionalisme, Raja, Thailand

ABSTRACT

Thailand is a unique country in Southeast Asia that was never colonized, unlike other countries in the region. Thai nationalism is strong, with the Thai or Siamese people originating from the Altai mountains in Central Asia around 7,000 years ago. Thai ethnic identity, meaning "free people," is the basis of their national pride. With advances in technology and civilization, Thailand's aristocratic government system began to shift towards democracy. These changes reflect the more predictable political spectrum in the modern system. However, the main challenge is maintaining tradition while adapting to democratic principles. The three sacred elements, the Thai Nation, the King, and the Buddha play an important role in Thai politics. Democracy must provide space for the people's role in government, but still maintain the significant role of the King in the political system. The king in Thailand is not only a symbol of nationalism but also has a great influence in social and political life. This article will discuss the influence of the development of democracy in Thailand, as well as the country's efforts to balance traditional values with modern democratic principles. The focus is on the king's role in maintaining political stability and how Thai ethnic nationalism can be aligned with democratic demands.

Keyword: Democracy, Ethnicity, King, Nationalism, Thailand

PENDAHULUAN

Sebagian besar populasi Thailand terdiri dari etnis Thai dan Lao, yang membentuk sekitar tiga perempat dari total populasi. Selain itu, ada komunitas besar etnis Tionghoa yang memiliki peran penting dalam ekonomi negara ini secara historis. Etnis lain termasuk Melayu di selatan, serta Mon, Khmer, dan berbagai suku pegunungan. Mayoritas agama yang dianut oleh penduduk Thailand adalah Budha (95%), disusul Islam (4%) dan lainnya (1%) [1].

Masyarakat Thailand mayoritas menganut agama Buddha Theravada. Agama Buddha Theravada mempengaruhi budaya Thailand sejak abad pertama Masehi, meskipun demikian Hinduisme juga memiliki dampak. Dengan agama Buddha yang menjadi mayoritas, keyakinan mengejar kedamaian dalam hubungan dengan sesama dan alam sekitar menjadi budaya yang mengakar di Thailand.

Kebudayaan yang dominan di Thailand adalah agama Buddha Theravada. Agama Buddha ini telah memainkan peran penting dalam kehidupan dan budaya sehari-hari masyarakat Thailand, dengan lebih dari 90% penduduknya mengidentifikasi diri sebagai penganut Buddha [2]. Aspek-aspek yang dipengaruhi adalah termasuk tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial. Kuil, juga disebut Wat, adalah tempat ibadah dan meditasi yang penting dan para biksu adalah anggota masyarakat yang dihormati.

Dasar kemerdekaan negara Thailand tidak pernah dijajah oleh bangsa Barat sehingga tidak memiliki hari kemerdekaan yang dirayakan secara resmi. Namun, sejak tahun 1960 negara Thailand memiliki peringatan hari nasional yang dirayakan yaitu tanggal 5 Desember, sebagai Hari Raya Thailand untuk memperingati hari kelahiran mendiang Raja Bhumibol Adulyadej (Rama IX) [3]. Thailand sering disebut juga Muangthai, Siam atau negara Gajah Putih. Kata Muangthai berasal dari salah satu nama suku bangsa di sana yaitu bangsa Thai. Thailand artinya bebas atau merdeka karena negara ini memang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Thailand adalah kerajaan yang berkonstitusi, pemerintah sehari-harinya dipegang oleh Perdana Menteri [3]. Gambaran kondisi psikologis masyarakat Thailand pada saat menetapkan hari nasionalnya didukung oleh beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam perubahan ini, salah satunya fakta bahwa monarki di seluruh dunia seperti Inggris, Jepang, dan Swedia, merayakan hari nasional pada hari ulang tahun raja mereka. Oleh karena itu, sejak 1960, Pemerintah Thailand menetapkan hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej yang jatuh pada tanggal 5 Desember, sebagai Hari Nasional Thailand.

Masyarakat Thailand cenderung lebih mengutamakan identitas etnis dibandingkan dengan nasionalisme dalam hal identifikasi diri dan sosial yang dimana walaupun ada rasa kebanggaan terhadap negara mereka, identitas etnis dan regional sering kali lebih menonjol dalam kehidupan sehari-hari [4]. Identitas sosial masyarakat Thailand dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, budaya, dan sejarah yang mungkin tercermin dalam cara mereka berinteraksi dengan sesama, nilai-nilai yang mereka anut, dan cara mereka memandang diri mereka sendiri dalam konteks masyarakat. Sementara, nasionalisme di Thailand dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, budaya, dan politik. Meskipun terdapat semangat nasionalisme yang kuat di antara sebagian masyarakat, terdapat juga variasi dalam tingkat nasionalisme di negara Thailand ini Pemerintah Thailand telah menggunakan berbagai metode untuk membangun identitas nasional dan memperkuat kesatuan bangsa, seperti menggunakan sistem pendidikan nasional untuk mempromosikan nilai-nilai nasionalisme, sejarah, dan budaya Thailand kepada generasi muda [5]. Hal ini sering kali dijadikan sebagai simbol kemajuan dan persatuan nasional sehingga proyek ini dapat dijadikan sebagai sarana dalam mempromosikan budaya Thailand baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini bertujuan untuk memperkuat identitas budaya Thailand dan meningkatkan rasa kebanggaan nasional di kalangan masyarakat. Para pemimpin politik Thailand, termasuk raja dan keluarga kerajaan, sering kali memainkan peran penting dalam membangun identitas nasional dan memperkuat kesatuan bangsa. Mereka sering kali menjadi simbol persatuan dan stabilitas nasional [6].

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan membaca dan mencatat hasil bahan penelitian. Adapun hasil bacaan yang diperoleh berasal dari *text book*, jurnal, artikel ilmiah, *literature review* yang berisikan konsep yang diteliti.

HASIL

Budaya Membangun Identitas Nasional

Di Thailand, salah satu cara membangun identitas nasional adalah melalui asimilasi. Orang Melayu menjadi sasaran kebijakan siamisasi dan asimilasi budaya (program Rathaniyom). Pemerintah berusaha menyiamkan sekolah-sekolah Melayu dengan memasukkan

kurikulum berlandaskan agama Buddha atau bahkan mengubah status sekolah Melayu Muslim menjadi sekolah Thai. Selain itu, pemerintah berupaya menghapus pengaruh bahasa Melayu di kalangan penduduk Patani, mengabaikan perayaan hari besar Islam, serta menganiaya, menahan, dan kadang-kadang membunuh para pemimpin agama dan politik dari etnis Melayu [7].

Kemajuan peradaban melalui ilmu pengetahuan, dunia menjadi semakin kecil, dan tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Masyarakat suatu daerah dapat mengunjungi negara lain dan membangun kerjasama saling menguntungkan, terjadi pertukaran barang (impor dan ekspor) dan pertukaran peradaban, maka dampak kemajuan negara maju akan berdampak pada negara karena kemajuan teknologi dan peradaban, sistem aristokrat yang menjadi model pemerintahan Kerajaan Thailand pada tahun mulai mengalami perubahan. Perubahan keadaan ini mendorong Thailand untuk mempertimbangkan desain politik yang sesuai bagi masyarakat Thailand, tidak merusak budaya dan tradisi mereka, serta dapat mengakomodasi kemajuan peradaban di negara-negara maju yang telah menerapkan sistem demokrasi dari pemerintah [8].

Peran Pemimpin Politik dalam Membangun Identitas Nasional

Setelah revolusi tahun 1932, raja masih memiliki pengaruh terhadap kehidupan berpolitik di Thailand. Raja berperan menyeimbangkan dinamika politik antara dua unsur lainnya, yaitu sipil dan militer. Sosok individu raja dalam politik sangatlah dominan. Hal ini disebabkan raja memiliki legitimasi yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat. Sosok Raja Thailand telah memenuhi konsep sumber legitimasi menurut Ramlan Surbakti. Sumber legitimasi tradisional berasal dari kepercayaan masyarakat bahwa raja adalah reinkarnasi dari Dewa. Ini menciptakan rasa patuh dan setia masyarakat kepada raja dengan harapan Sang Raja mampu memberi perlindungan kepada mereka [8].

Seorang pemimpin militer, Phibun Songkram, yang berkuasa pada tahun 1938, memainkan peran dalam membentuk identitas nasional di Thailand melalui kebijakan yang dikenal sebagai Rathaniyom. Rathaniyom adalah ideologi politik yang terdiri dari 12 pasal yang mencakup berbagai aspek sosial dan budaya, seperti penggunaan nama negara, bahasa, dan adat istiadat Thailand. Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai kelompok etnis di Thailand ke dalam satu identitas nasional Thai [7].

Nasionalisme Thai mulai muncul pada awal abad ke-20 di bawah kepemimpinan Raja Vajiravudh

(Rama VI) yang memerintah dari tahun 1910-1925. Raja Vajiravudh berusaha mempromosikan identitas nasional yang terpisah dari pengaruh Barat dan memperkuat rasa kebanggaan nasional rakyat Thailand. Ia melakukan ini melalui berbagai kebijakan budaya dan pendidikan yang menekankan keunikan identitas Thai. Salah satu inisiatif pentingnya adalah mengganti istilah "Siam" dengan "Thailand" untuk menegaskan identitas bangsa. Selain itu, Raja Vajiravudh juga mendirikan berbagai institusi budaya dan organisasi pemuda untuk menyebarkan semangat nasionalisme di kalangan rakyatnya [9].

Peran rakyat dalam membangun identitas nasional Thailand

Turunan dari kepercayaan tradisional Thailand membuat raja dan rakyat Thailand memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam sejarah, negara Thailand tidak pernah mengalami penjajahan, sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dari negara-negara lain di Semenanjung atau Asia Tenggara pada umumnya. Penduduk Thailand dikenal dengan sebutan orang Thai atau Siam, tetapi nama yang lebih umum digunakan adalah Thai, yang dalam bahasa Thai berarti "orang bebas." Menurut D.G.E. Hall, asal-usul orang Thai mirip dengan orang China dari segi fisik. Dipercaya bahwa sekitar 7000 tahun yang lalu, mereka tinggal di daerah pegunungan Altai di Mongolia sebelum bermigrasi ke selatan yang lebih subur sekitar 2500 tahun kemudian [2].

Menurut *Royal Thai Embassy*, rakyat Thailand memainkan peran krusial dalam membangun identitas nasional dengan mempertahankan dan mengembangkan budaya, bahasa, dan tradisi mereka sepanjang sejarah. Mereka berkontribusi pada kemerdekaan dan kemajuan negara melalui migrasi, pembentukan kerajaan seperti Sukhothai dan Ayutthaya, serta adaptasi terhadap berbagai pengaruh asing tanpa kehilangan jati diri [10]. Reformasi sosial, ekonomi, dan pendidikan yang dilakukan oleh para raja, seperti Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn, mencerminkan semangat rakyat dalam memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan nasional. Dengan hadirnya pemimpin ini, orang Thai memiliki penguasa yang mereka tunduk, dan wilayah yang ditaklukkan menjadi bagian dari kekuasaannya, sehingga memenuhi syarat untuk berdiri sebagai sebuah kerajaan (negara) dengan wilayah, pemerintahan, dan rakyat yang jelas. Dari keturunan Raja Ramkhamhaeng pada periode Sukhothai inilah kerajaan Thai terbentuk. Kepemimpinan yang diwariskan secara turun-temurun ini menjadi penentu bagi kerajaan hingga akhirnya terbentuklah Thailand sebagai

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024 "Menilik Isu Kewarganegaraan: Dinamika Perkembangan Global pada Era *Society 5.0*"

sebuah negara [11]. Rakyat menganggap raja sebagai Bodhisattva, pemilik kebajikan tertinggi, dan dipercaya sebagai reinkarnasi dari seseorang yang sangat suci. Pemikiran bahwa kebaikan hanya berasal dari raja karena keyakinan reinkarnasi sangat kuat, menjadikannya sebagai penjaga Buddhisme dan Sangha. Keduanya menjadi sumber legitimasi raja, yang membuatnya menjadi simbol penyatuan dan identitas bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan raja adalah mutlak bagi rakyatnya, sehingga model pemerintahannya adalah monarki absolut [8].

Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dunia menjadi semakin terhubung tanpa batasan waktu dan ruang. Masyarakat dari satu daerah bisa mengunjungi negara lain dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan, termasuk pertukaran barang dan pertukaran budaya. Kemajuan di negara-negara maju mempengaruhi negara lain melalui teknologi dan peradaban, menyebabkan sistem aristokratis yang menjadi model pemerintahan Kerajaan Thailand mulai berubah. Yang dimana, hal ini tentu mengubah sistem identitas nasional dari Thailand, yaitu terjadi transisi dari monarki absolut ke monarki konstitusional pada tahun 1932, yang didukung oleh intelektual muda dan rakyat, menunjukkan kesiapan mereka dalam menerima perubahan demi membangun bangsa yang modern dan demokratis [11].

Pada tahun 1932, dimulailah era demokrasi di Thailand. Proses demokratisasi dimulai dengan kudeta untuk membatasi kekuasaan raja dan melibatkan warga dalam pemerintahan. Penerapan demokrasi di Thailand bertentangan dengan nilai-nilai tradisional, karena konsep demokrasi sebenarnya tidak selaras dengan nilai-nilai tradisional Thailand. Inti dari demokrasi adalah bagaimana rakyat memiliki peran yang maksimal, di mana kekuasaan ada pada rakyat. Pemikiran ini sejalan dengan tradisi Thailand yang memposisikan raja sebagai inti atau pusat keyakinan rakyat. Keputusan yang diambil oleh raja dianggap sebagai tanggung jawab kepada rakyat. Meskipun demikian, keputusan akhir tetap ada pada raja, sesuai dengan nilai-nilai Thailand yang menghargai ketaatan pada raja. Meskipun kepatuhan tanpa perlawanan dianggap baik, hal ini dapat dianggap sebagai paradoks demokrasi karena keputusan raja tidak bisa dipertanyakan. Keputusan raja bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kedamaian rakyat Thailand, dengan harapan agar demokrasi dapat diterima sebagai bagian dari pemerintahan yang mencerminkan tradisi dan modernitas Thailand [8]. Perubahan ini mendukung Thailand untuk mempertimbangkan politik yang sesuai dengan

masyarakat mereka, yang tetap mempertahankan budaya dan tradisi, sambil mengakomodasi kemajuan peradaban dari negara-negara maju yang telah menerapkan identitas nasionalnya melalui sistem pemerintahan demokratis [8].

SIMPULAN

Di Thailand, salah satu cara membangun identitas nasional adalah melalui kebijakan asimilasi budaya, khususnya program Rathaniyom di bawah Phibun Songkram, yang menargetkan komunitas Melayu Patani dengan mengubah kurikulum sekolah mereka dan menghapus pengaruh bahasa Melayu. Kemajuan teknologi dan peradaban mendorong perubahan sistem politik Thailand dari monarki absolut ke monarki konstitusional pada tahun 1932. Raja tetap berpengaruh dalam menjaga stabilitas politik, sementara rakyat memainkan peran penting dalam mempertahankan dan mengembangkan budaya nasional. Proses demokratisasi memperlihatkan upaya Thailand untuk menyeimbangkan tradisi dengan prinsip-prinsip demokrasi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mania, "Perkembangan Sosial Islam di Thailand," *Al Ma' Arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, vol. 1, no. 1, 2019.
- [2] E. London, "Thailand Condensed: 2000 years of history and culture," *Singapore: Marshall Cavendish Editions*, 2008.
- [3] M. Sumaher Orlandio, "Power Politics Negara Thailand pada Masa Kolonialisme 1511 – 1980," UIN Raden Fatah Palembang, 2021.
- [4] D. Conversi, "Mapping the field: Theories of nationalism and the ethnosymbolic approach," In A. S. Leoussi & S. Grosby (Eds.), *Nationalism and ethnosymbolism: History, culture and ethnicity in the formation of nations*, 2007, pp. 15-30.
- [5] Chulalongkorn University, "Getting to know Thailand," <https://www.chula.ac.th/en/academics/life-at-cu/getting-to-know-thailand/> (accessed Jun. 12, 2024).
- [6] S. Thananithichot, "Understanding Thai nationalism and ethnic identity," *Journal of Asian and African Studies*, vol. 46, no. 3, 2011, <https://doi.org/10.1177/0021909611399735>.
- [7] H Lamato, S Sumarno, N Umamah, "The Role Of Haji Sulong In Fighting Special Autonomy For Patani Southern Thailand (1947-1954)," *Jurnal Historica*, vol. 1, no. 1, 2017.
- [8] A. Y. Hartati, "Peran 'Eka Lak Thai' dalam Demokrasi di Thailand," *Sosio Dialektik*, vol. 4, no. 1, pp. 1–13, 2019, doi: <https://doi.org/10.31942/sd.v4i1.3002>.
- [9] Thongchai Winichakul, "Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation," University of Hawaii Press, 1994.
- [10] Royal Thai Embassy, "Thailand's history," 2020, https://www.thaiembassy.at/en/content_page/item/18-thailands-history.html (accessed Jun. 12, 2024).
- [11] CFR, "Thailand: Democratic Failure It's Lessons Middle East," 2015, <http://www.cfr.org/thailand/thailand-democratic-failure-its-lessons-middle-east/p24485> (accessed Jun. 12, 2024).